

Research Article**Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony****Yogi Yulihastoro**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: yulihastoroyogi@student.uns.ac.id**Afif Raihan Raditya**

Universitas Sebelas Maret

E-mail: radityaa123@student.uns.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Aslim: Journal of Education and Islamic Studies.

Received : January 28, 2026

Revised : February 17, 2026

Accepted : March 18, 2026

Available online : March 31, 2026

How to Cite: Yogi Yulihastoro Wahyudi, & Afif Raihan Raditya. (2026). Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony. *Aslim: Journal of Education and Islamic Studies*, 3(1), 59–67. <https://doi.org/10.63738/aslim.v3i1.60>**Abstract**

The rights and obligations of citizens are two fundamental concepts that form the foundation of national and state life. In the Indonesian context, these two aspects are not only rooted in formal legal norms such as the 1945 Constitution, but also based on the values of Pancasila, which regulate how citizens should behave in social life. This study aims to analyze the reciprocal relationship between the rights and obligations of citizens, explain the urgency of harmonizing them, and identify the main obstacles that hinder their implementation in modern society. This study uses a literature review method by analyzing five academic journals that discuss issues surrounding citizenship, democracy, Pancasila, and the implementation of rights and obligations in Indonesia. The results of the study indicate that the imbalance between rights and obligations results in social tensions, low legal awareness, and a decline in the quality of democracy. Furthermore, it was found that factors such as unequal fulfillment of rights, low civic literacy, weak character education, and inconsistent law enforcement contribute to exacerbating social disharmony. This study concludes that to achieve a harmonious social life, collaboration between the government and citizens is necessary through civic empowerment, equal access to basic rights, and increased awareness of obligations through education and consistent law enforcement.

Keywords: Citizens Rights, Citizens Obligations, Pancasila, Democracy, Social Disharmony.**Transformasi Pendidikan Karakter dalam Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban Warga Negara untuk Harmonisasi Sosial****Abstrak**

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep fundamental yang membentuk fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, kedua aspek tersebut tidak hanya berakar pada norma hukum formal seperti UUD 1945, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila

Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony

Yogi Yulihastoro, Afif Raihan Raditya

yang mengatur bagaimana warga negara seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara, menjelaskan urgensi harmonisasi keduanya, serta mengidentifikasi hambatan utama yang mengganggu pelaksanaannya dalam masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisis lima jurnal akademik yang membahas isu-isu seputar kewarganegaraan, demokrasi, Pancasila, dan implementasi hak serta kewajiban di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban berdampak pada munculnya ketegangan sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta menurunnya kualitas demokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti ketidakmerataan pemenuhan hak, rendahnya literasi kewarganegaraan, lemahnya pendidikan karakter, serta inkonsistensi penegakan hukum turut memperburuk disharmoni sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan warga negara melalui pemberdayaan kewarganegaraan, pemerataan akses terhadap hak dasar, serta peningkatan kesadaran kewajiban melalui pendidikan dan penegakan hukum yang konsisten.

Kata Kunci: Hak Warga Negara, Kewajiban Warga Negara, Pancasila, Demokrasi, Disharmoni Sosial.

PENDAHULUAN

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada dasarnya menuntut adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sebagai dua unsur penting dalam membangun masyarakat yang tertib, stabil, serta mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dalam konteks Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban tidak semata-mata berlandaskan aturan legal seperti yang tercantum dalam UUD 1945, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang lebih mendalam karena berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung prinsip moral yang mengatur hubungan adil antara negara dan warga negara, sehingga konsep hak dan kewajiban tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter serta etika sosial (Nugraha et al., 2023).

Idealnya, negara berkewajiban memenuhi hak warga negara secara adil dan merata, sementara warga negara menjalankan kewajiban mereka dengan penuh kesadaran. Namun, kondisi nyata menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam. Banyak warga lebih gencar menuntut hak seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berekspresi, tetapi tidak seimbang dengan kepatuhan terhadap kewajiban seperti menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain. Fenomena ini mencerminkan kecenderungan individualistik yang semakin menguat akibat pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman, sehingga kesadaran kolektif terhadap tanggung jawab sosial semakin melemah (Rianto, Fatekhah, & Suparmi, 2025). Ketidakseimbangan tersebut dapat memicu konflik sosial, pelanggaran hukum, serta menurunnya kepercayaan antarwarga maupun kepada negara.

Di sisi lain, pemenuhan hak oleh negara juga belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penegakan hukum yang tidak konsisten menandakan bahwa sebagian masyarakat belum memperoleh hak konstitusional secara optimal. Ketidakmerataan ini tidak hanya memperlebar disparitas sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika hak dasar tidak terpenuhi, warga cenderung mengabaikan kewajiban, sehingga hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat menjadi kurang harmonis (Dari et al., 2024).

Pendidikan kewarganegaraan sebenarnya memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran tentang hak dan kewajiban. Namun, implementasinya masih sering bersifat teoritis dan normatif tanpa memberikan pengalaman nyata yang cukup untuk membentuk karakter warga negara. Akibatnya, pemahaman tentang hak dan

kewajiban hanya berhenti pada tingkat pengetahuan, bukan pada internalisasi nilai dan perilaku sehari-hari (Izzati & Novitasari, 2023). Pada saat yang sama, perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memengaruhi cara warga memahami hak dan kewajiban. Meskipun membuka ruang kebebasan berekspresi, media sosial juga memunculkan permasalahan seperti hoaks, ujaran kebencian, polarisasi, dan intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan sebagai hak harus disertai kewajiban untuk menjaga etika komunikasi dan kebenaran informasi (Rahmat et al., 2025).

Melihat kompleksitas hubungan antara hak dan kewajiban tersebut, analisis mendalam sangat diperlukan untuk memahami sejauh mana keduanya berjalan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Harmonisasi hak dan kewajiban sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil, tertib, dan demokratis. Ketidakseimbangan antara keduanya tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep, implementasi, hambatan, serta strategi dalam mewujudkan keselarasan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia (Rianto et al., 2025). Melalui kajian pustaka dari berbagai jurnal yang relevan, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana sinergi antara negara dan warga dapat membentuk masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah seperti jurnal akademik, buku, peraturan perundang-undangan, serta literatur relevan yang membahas konsep hak dan kewajiban warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman teoritis sekaligus menilai berbagai temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan harmonisasi hak dan kewajiban, peran negara, serta dinamika sosial yang memengaruhi implementasinya. Seluruh sumber yang dikaji dianalisis secara kritis melalui pendekatan deskriptif-analitis untuk menyusun sintesis yang komprehensif mengenai hambatan, tantangan, dan strategi dalam mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tabel Data Artikel

No	Metode	Nama Jurnal, Artikel, Tahun	Penulis	Hasil
1	Kualitatif	Harmoni Kewajiban dan Hak Negara dan Warga Negara dalam Demokrasi yang Bersumbu Kedaulatan Rakyat dan Musyawarah (2014)	Diniasih Saskia Sinaga, Jelita Situmorang, Marcelia, Veronika Elvina Weking	Artikel ini menyoroti pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban warga negara dalam sistem demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil, stabil, dan berkeadilan. Keseimbangan ini diperlukan agar hak-hak warga dihormati sekaligus kewajiban mereka dipenuhi secara adil dan merata.
2	Kualitatif	Hak dan Kewajiban	Intan Nuraini	Artikel ini membahas hak dan kewajiban warga negara, dasar

Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony

Yogi Yulihastoro, Afif Raihan Raditya

		Warga Negara (2024)		hukumnya, serta tantangan dalam penerapannya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis
3	Kualitatif	Harmonisasi Hak dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Responsibility) (2023)	Firda Aulia Izzati, Novitasari	Artikel ini membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara agar tercipta masyarakat yang harmonis dan bertanggung jawab.
4	Hukum Normatif	Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Sesuai Dengan Nilai (2024)	Agnes Tika, Dian Aulia, Tarisya Arliani Munandar	Artikel ini membahas pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan.
5	Kualitatif	Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara Demokrasi (2024)	Zahra Nauli, Elviana, Sasmi Nelwati	Artikel ini membahas pentingnya harmonisasi antara hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia, dengan menekankan bahwa kedua aspek tersebut harus seimbang agar kehidupan berbangsa berjalan baik; pembahasan mencakup dasar hukum dalam UUD 1945, perkembangan historis dan politis terkait hak asasi manusia, bentuk hak dan kewajiban warga negara, tantangan ketidakseimbangan hak-kewajiban, serta perlunya pendidikan karakter dan kesadaran hukum untuk mewujudkan demokrasi yang harmonis.
6	Kualitatif Deskriptif	Hak dan Kewajiban Warga Negara (2025)	Raudhatul Jannah, Riska Halda Lubis, Kamdani	Artikel ini membahas bagaimana hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 serta menekankan perlunya keseimbangan antara keduanya untuk menjaga kehidupan berbangsa yang demokratis. Penulis menjelaskan berbagai

Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony

Yogi Yulihastoro, Afif Raihan Raditya

				hak seperti pendidikan dan kebebasan berpendapat, serta kewajiban seperti menaati hukum dan membayar pajak, sambil menyoroti bahwa ketimpangan pemahaman hak-kewajiban dapat menyebabkan masalah sosial. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab warga negara.
7	Kualitatif	Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara (2025)	St. Hadijah Wahid, Nurandini, Sri Ayuninsi, Destiani, Salmi, Haerani	Artikel ini membahas pemahaman dasar tentang siapa yang disebut sebagai warga negara serta hak dan kewajiban yang melekat pada setiap individu dalam suatu negara. Penulis menekankan bahwa hak, seperti pendidikan, perlindungan hukum, dan kebebasan berpendapat harus sejalan dengan kewajiban warga negara, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan menjaga persatuan. Artikel ini juga menjelaskan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat penting agar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berlangsung tertib, adil, dan harmonis.
8	Kualitatif Deskriptif	Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Kebebasan Berpendapat Berekspresi (2021)	Elfia Farida	Artikel ini menemukan bahwa negara Indonesia memiliki tiga kewajiban utama dalam HAM: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berpendapat serta berekspresi. Hak ini dijamin dalam UUD 1945, ICCPR (Pasal 19), Prinsip Siracusa, dan Komentar Umum No. 34. Namun dalam praktiknya, negara sering gagal memberikan perlindungan yang memadai, ditunjukkan oleh kriminalisasi kritik, penggunaan pasal karet UU ITE, serta tindakan represif seperti

Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony

Yogi Yulihastoro, Afif Raihan Raditya

				<p>penghapusan mural kritik. Artikel juga menegaskan bahwa hak berpendapat adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable), sedangkan kebebasan berekspresi dapat dibatasi tetapi hanya melalui mekanisme yang sah, proporsional, dan diperlukan untuk melindungi hak orang lain. Negara tidak boleh menggunakan alasan keamanan nasional atau ketertiban umum secara sewenang-wenang untuk membungkam ekspresi publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi, penegakan hukum yang lebih adil, dan komitmen negara untuk memastikan ruang kebebasan sipil tetap terjaga.</p>
9	Kualitatif Deskriptif	Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia (2025)	Rosid Ibnu Rianto, Syiva Alifah Nur Fatekhah, Suparmi	<p>Artikel ini menunjukkan bahwa harmoni antara hak dan kewajiban adalah fondasi utama kehidupan bernegara yang demokratis dan stabil. Ketidakseimbangan, misalnya negara menuntut kewajiban warga tetapi tidak sepenuhnya memenuhi hak mereka, dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan ketimpangan sosial. Kajian pustaka dari berbagai artikel tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa warga negara ideal harus melaksanakan dua bentuk tanggung jawab: tanggung jawab pribadi (terhadap diri, moralitas, dan integritas) serta tanggung jawab sosial (kepatuhan hukum, partisipasi dalam demokrasi, menjaga ketertiban, serta menghormati hak warga lain). Temuan lain menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sejak dini untuk menanamkan pemahaman mengenai hak–</p>

Transforming Character Education in Balancing Citizens' Rights and Obligations for Social Harmony

Yogi Yulihastoro, Afif Raihan Raditya

				kewajiban, serta peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menyeimbangkan keduanya. Penelitian menegaskan bahwa harmonisasi hak–kewajiban tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral dan etis, sehingga pembentukan karakter warga negara yang sadar konstitusi menjadi kunci bagi terciptanya masyarakat yang tertib, adil, dan berkelanjutan.
--	--	--	--	---

Berdasarkan hasil analisis, dapat dipahami bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua konsep fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam pembentukan kehidupan sosial yang harmonis. Hak memberikan jaminan bagi warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak, perlindungan hukum, serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Sementara itu, kewajiban berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum yang mengarahkan warga negara agar bertindak sesuai dengan kepentingan umum. Keseimbangan antara keduanya menjadi dasar penting dalam mewujudkan tatanan sosial yang stabil dan adil (Nugraha et al., 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan keseimbangan antara hak dan kewajiban di masyarakat masih menghadapi banyak tantangan. Banyak warga negara lebih menuntut haknya daripada memahami dan melaksanakan kewajibannya. Tuntutan terhadap pelayanan publik, peningkatan keamanan, serta kebebasan berpendapat seringkali tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap kewajiban seperti menaati hukum, menjaga ketertiban, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya pelanggaran hukum, rendahnya disiplin sosial, serta meningkatnya konflik horizontal (Rianto, Fatekhah, & Suparmi, 2025).

Rendahnya literasi kewarganegaraan turut memperparah situasi tersebut. Pendidikan kewarganegaraan di berbagai jenjang pendidikan dinilai belum efektif dalam menanamkan nilai dan karakter yang mencerminkan warga negara yang bertanggung jawab. Proses pembelajaran masih didominasi pendekatan teoritis sehingga peserta didik mengetahui konsep hak dan kewajiban secara kognitif tetapi belum menginternalisasikannya dalam perilaku nyata. Paradigma ekologi kewarganegaraan menawarkan perspektif baru dengan menekankan bahwa warga negara merupakan bagian dari jejaring sosial, budaya, dan lingkungan sehingga keberlangsungan kehidupan bersama sangat dipengaruhi oleh keseimbangan tindakan individu dan kolektif (Izzati & Novitasari, 2023).

Peran negara juga sangat menentukan keberhasilan harmonisasi hak dan kewajiban warga negara. Negara bertanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut belum berjalan merata di seluruh wilayah Indonesia. Masih terdapat daerah terpencil yang mengalami keterbatasan fasilitas dan akses layanan publik. Ketidakmerataan ini menyebabkan sebagian warga negara tidak memperoleh haknya secara optimal, yang pada akhirnya menurunkan motivasi mereka untuk menjalankan kewajiban secara penuh (Dari et al., 2024).

Penegakan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Ketidakadilan dalam proses hukum, lemahnya konsistensi implementasi

aturan, serta kasus korupsi di lembaga negara menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Ketika masyarakat merasa hukum tidak ditegakkan secara adil, mereka cenderung bersikap skeptis dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Hal ini berdampak langsung pada runtuhnya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Rahmat et al., 2025). Selain faktor hukum, dinamika sosial budaya dan kemajuan teknologi turut memengaruhi hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Perkembangan media digital memang memberikan ruang bagi warga untuk mengekspresikan diri dan mengakses informasi dengan mudah, tetapi juga memunculkan masalah baru seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial. Kurangnya literasi digital membuat sebagian masyarakat terjebak dalam perilaku komunikasi negatif yang dapat memicu konflik. Padahal, nilai-nilai Pancasila mengajarkan pentingnya sikap kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sebagai pedoman utama dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban. Tantangan terbesar terletak pada proses internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang kerap terhambat oleh kurangnya keteladanan sosial dan lemahnya pendidikan karakter (Rahmat et al., 2025).

Secara keseluruhan, harmonisasi hak dan kewajiban warga negara merupakan proses multidimensional yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, sosial budaya, dan pemerintahan. Negara perlu memastikan pemenuhan hak secara merata dan penegakan hukum yang adil, sementara warga negara harus memiliki kesadaran penuh untuk menjalankan kewajiban demi kepentingan bersama. Ketika kedua pihak dapat berkolaborasi secara efektif, maka kehidupan sosial yang damai, stabil, adil, dan harmonis dapat terwujud secara nyata (Rianto et al., 2025).

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara merupakan dua aspek fundamental yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak memberikan ruang kepada warga negara untuk menikmati perlindungan, pelayanan, dan kebebasan yang dijamin oleh negara, sedangkan kewajiban mengatur bagaimana warga negara harus bertindak agar kehidupan sosial dapat berlangsung dengan tertib dan berkeadaban. Keduanya saling terkait dan menentukan satu sama lain; hak tidak dapat terlaksana secara optimal tanpa adanya pelaksanaan kewajiban, dan kewajiban tidak akan memiliki makna apabila tidak ditujukan untuk menjamin hak orang lain. Harmonisasi antara kedua aspek ini merupakan inti dari kehidupan sosial yang stabil, adil, dan harmonis.

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam masyarakat Indonesia adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Warga negara cenderung lebih fokus menuntut hak tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai kewajiban yang harus dijalankan. Fenomena ini tampak dari rendahnya kesadaran hukum, lemahnya kedisiplinan sosial, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program negara. Di sisi lain, negara juga belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh hak konstitusional warga negara secara merata, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hak dan kewajiban masih belum berjalan dengan baik, sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan sosial dan stabilitas nasional.

Selain itu, penegakan hukum yang belum konsisten turut memperlemah hubungan antara warga negara dan negara. Ketika hukum tidak ditegakkan secara adil dan transparan, masyarakat menjadi skeptis dan enggan menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, perbaikan pada sektor penegakan hukum menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan publik dan menciptakan suasana sosial yang kondusif. Dengan

penegakan hukum yang adil dan tegas, baik warga negara maupun aparaturnegara akan lebih terdorong untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai aturan.

Pendidikan kewarganegaraan, nilai Pancasila, serta pendidikan karakter memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Pendidikan yang efektif tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, rasa tanggung jawab, toleransi, dan sikap saling menghargai. Penguatan pendidikan karakter perlu diperkuat di semua lini, mulai dari keluarga, sekolah, institusi pemerintah, hingga masyarakat umum. Penguatan ini sangat penting mengingat tantangan zaman modern, termasuk globalisasi, kemajuan teknologi, dan derasnya arus informasi yang dapat mempengaruhi moralitas dan pola pikir masyarakat.

Secara keseluruhan, kehidupan sosial yang harmonis hanya dapat diwujudkan apabila terdapat sinergi antara peran negara dan warga negara. Negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak warga negara secara adil, merata, dan berkelanjutan, sementara warga negara harus menjalankan kewajibannya secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab. Harmoni ini merupakan kunci terciptanya masyarakat yang damai, demokratis, dan berkeadilan. Dengan demikian, penguatan harmonisasi hak dan kewajiban merupakan agenda penting yang harus menjadi perhatian bersama demi mewujudkan Indonesia yang maju, bermoral, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Dari, U., Hartono, A., & Wahyu, D. (2024). *Memperkuat keseimbangan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan*. CIVILIA: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.
- Izzati, F. A., & Novitasari, S. (2023). *Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara bertanggung jawab (Civic Responsibility)*. Jurnal Kalacakra, Universitas Tidar.
- Nugraha, A. R., Lestari, A., & Putra, M. (2023). *Pemahaman siswa tentang kewajiban dan hak warga negara*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha.
- Rahmat, K. A., Sari, M. A., & Yuliani, R. (2025). *Mewujudkan harmonisasi antara hak dan kewajiban negara dan warga di era globalisasi*. Jurnal Didaktik, STKIP Subang.
- Rianto, R. I., Fatekhah, S. A. N., & Suparmi. (2025). *Mewujudkan harmoni hak dan kewajiban warga negara dalam praktik bernegara di Indonesia*. Marasofi Publishing Journal.
- Nuraini, I. (2024). *Hak dan kewajiban warga negara*. JURNAL PENDIS.
- Tika, A., Aulia, D., & Munandar, T. A. (2024). *Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila*. Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora.
- Nauli, Z., Elviana, & Nelwati, S. (2024). *Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi*. Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan
- Jannah, R., Lubis, R. H., & Kamdani. (2025). *Hak dan Kewajiban Warga Negara*. Journal of Literature Review.
- Wahid, S. H., Nurandini, N., Ayuninsi, S., Destiani, D., Salmi, S., & Haerani. (2025). *Warga Negara, Hak dan Kewajiban Warga Negara*. CARONG.
- Farida, E. (2021). *Kewajiban Negara Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspressi*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE,
- Rianto, R. I., Fatekhah, S. A. N., & Suparmi. (2025). *Mewujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Praktik Bernegara di Indonesia*. J. Kaj. Inov. Ilmu.